

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

TAHUN 2016



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOLOK**

Jl. Raya Solok - Padang KM. 23 Arosuka

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan izinnya Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan kabupaten Solok Tahun 2016 dapat kami susun sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan yang dibuat secara periodik setiap tahunnya. Informasi keuangan merupakan salah satu komponen yang penting bagi setiap organisasi. Banyak pemangku kepentingan (*stake holder*) yang menggunakan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja.

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menuntut dilaksanakannya pelaporan keuangan pada tingkat SKPD. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Guna memenuhi tuntutan undang – undang serta kebutuhan akan informasi keuangan, maka Dinas Kesehatan Kab. Solok menerbitkan Laporan Keuangan Tahun 2016. Penyusunan Laporan Keuangan ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan saran – saran untuk perbaikan. Atas segala keberhasilan penatausahaan Tahun 2016 akan tetap dipertahankan dan diusahakan lebih baik sedangkan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi sebelumnya untuk diminimalisir semaksimalnya dimasa yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan tahun – tahun sebelumnya menjadi cambuk dan pendorong bagi kami untuk memperbaiki segala kekurangan secara bertahap dan berkelanjutan.

Solok, 22 Februari 2017
Pengguna Anggaran

dr. Sri Efianti
Pembina

NIP : 19690210 200312 2 002

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Posuka, 22 Februari 2017
Pengguna Anggaran

dr. Sri Estanti
Pembina

NIP : 19690210 200312 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
NERACA DINAS KESEHATAN KAB.SOLOK
Per 31 Desember Tahun 2016 Dan Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH	
	2016	2015
ASET	95.533.147.166,53	54.538.844.183,88
ASET LANCAR	6.585.604.163,00	3.714.155.204,88
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	✓ 37.959.181,00	1.157.000,72
- Kas Dibendahara Pengeluaran FKTP	-	-
- Piutang Pajak Daerah	-	-
- Piutang Retribusi	-	-
- Penyisihan Piutang	-	-
- Piutang Lain-lain	-	-
- Persediaan	✓ 6.547.644.982,00	3.712.998.204,16
ASET TETAP	87.640.781.770,53	49.517.927.746,00
- Tanah	✓ 3.081.648.500,00	✓ 3.081.648.500,00
- Peralatan dan Mesin	✓ 37.184.644.636,53	26.564.907.898,00
- Gedung dan Bangunan	✓ 46.689.773.223,00	37.896.971.223,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	✓ 625.814.000,00	✓ 598.091.000,00
- Aset Tetap Lainnya	✓ 58.901.411,00	✓ 37.831.411,00
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(18.661.522.286,00)
Jumlah Aset Tetap	✓ 87.640.781.770,53	49.517.927.746,00
ASET Tetap Lainnya	1.306.761.233,00	1.306.761.233,00
- Tuntutan Ganti Rugi	-	-
- Aset Kondisi Rusak Berat	✓ 1.133.825.241,00	1.133.825.241,00
- Aset Lain-lain	✓ 172.935.992,00	172.935.992,00
Kemitraan Dengan Pihak ke Tiga	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	-	-
JUMLAH ASET	✓ 95.533.147.166,53	54.538.844.183,88
KEWAJIBAN	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Utang Bunga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
EKUITAS	95.533.147.166,53	54.538.844.183,88
EKUITAS	95.533.147.166,53	54.538.844.183,88
Ekuitas	95.533.147.166,53	54.538.844.183,88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	✓ 95.533.147.166,53	54.538.844.183,88



Arosuka, 24 Februari 2017
Pengguna Anggaran

dr. Sri Hianti
Pembina

NIP : 19690210 200312 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

Nomor Urut	Uraian	2016		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3		
1	PENDAPATAN	14.084.026.000,00	13.560.722.759,00	96,28
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.084.026.000,00	13.560.722.759,00	96,28
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.230.011.500,00	1.626.985.759,00	72,96
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah / Kapitasi	11.854.014.500,00	11.933.737.000,00	100,67
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	14.084.026.000,00	13.560.722.759,00	96,28
	JUMLAH PENDAPATAN	14.084.026.000,00	13.560.722.759,00	96,28
2	BELANJA	101.066.396.811,02	89.565.438.258,45	88,62
2.1	BELANJA OPERASI	79.482.305.726,02	70.104.106.519,92	88,20
5.1.1	Belanja Pegawai	42.758.001.690,02	40.512.169.191,00	94,75
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	36.724.304.036,00	29.591.937.328,92	80,58
	Jumlah Belanja Operasi	79.482.305.726,02	70.104.106.519,92	88,20
2.2	Belanja Modal	21.584.091.085,00	19.461.331.738,53	90,17
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.304.683.935,00	10.619.736.738,53	86,31
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	9.202.306.150,00	8.792.802.000,00	95,55
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.450.000,00	27.723.000,00	68,54
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.651.000,00	21.070.000,00	57,49
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	21.584.091.085,00	19.461.331.738,53	90,17
	Jumlah Belanja	101.066.396.811,02	89.565.438.258,45	88,62
	Surplus/ (Defisit)	(86.982.370.811,02)	(76.004.715.498,45)	87,38

Arosuka, 20 Februari 2017
Pengantar Anggaran
dr. GRIFFANTI
Pembina
NIP : 19690210 200312 2 002

KABUPATEN SOLOK
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Nomor	Uraian	2016	2015
1	2		
	KEGIATAN OPERASIONAL	13.560.722.759,00	19.078.698.674,00
1	PENDAPATAN	13.560.722.759,00	19.078.698.674,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.560.722.759,00	13.412.440.078,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.626.985.759,00	1.558.425.578,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (JKN)	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	11.933.737.000,00	11.854.014.500,00
1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	5.666.258.596,00
1.5.2	Pendapatan Lainnya	-	5.666.258.596,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	13.560.722.759,00	19.078.698.674,00
2	BEBAN	70.104.106.519,92	54.922.411.795,76
2.1	BELANJA OPERASI	70.104.106.519,92	54.922.411.795,76
2.1.1	Beban Pegawai	40.512.169.191,00	34.895.582.619,00
2.1.2	Beban Barang Dan Jasa	29.591.937.328,92	21.447.736.308,76
2.1.3	Beban Bunga	-	-
2.1.4	Beban Subsidi	-	-
2.1.5	Beban Bantuan Sosial	-	-
2.1.6	Beban Penyusutan	-	(1.420.907.132,00)
2.1.7	Beban Lain-lain	-	-
	Jumlah Beban Operasional	70.104.106.519,92	54.922.411.795,76
	JUMLAH BEBAN	70.104.106.519,92	54.922.411.795,76
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASIONAL	(56.543.383.760,92)	(35.843.713.121,76)
	SURPLUS / DEFISIT - LO	(56.543.383.760,92)	(35.843.713.121,76)


 dr. Sri Mianti
 Pembina

NIP : 19690210 200312 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KESEHATAN
LAPORAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	2016	2015
1	2	3
Ekuitas Awal	95.533.147.167	54.538.844.184
Suirplus / Defisit - LO	(56.543.383.761)	(35.843.713.122)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	-	-
- Koreksi Persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Lain-Lain	-	-
Ekuitas Akhir	38.989.763.406	18.695.131.062


 Rosuka, 22 Desember 2017
 Kepala Dinas Kesehatan
 dr. Sri Efanti
 Pembina

NIP : 19690210 200312 2 002

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN KAB. SOLOK
TAHUN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok disusun guna menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami penurunan atau kenaikan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar biaya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014.
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Prosedur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 meliputi hal – hal sebagai berikut :

- ✓ PEDAHULUAN
- ✓ EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD SKPD

- ✓ IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SKPD
- ✓ KEBIJAKAN AKUNTANSI
- ✓ PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
- ✓ PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mensejahterakan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2016, bertanggungjawab dalam merealisasikan program – program dan kegiatan yang berkontribusi meningkatkan laju perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang ingin dicapai dalam Tahun 2016 adalah membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah guna mewujudkan Good Governance dan terciptanya pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar terlaksana kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan diibidang pengawasan yang diimplementasikan dalam Tahun 2016 guna menggerakkan perekonomian masyarakat antara lain :

- a. Terselenggaranya pengawasan yang efektif dan bermatabat.
- b. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas mekanisme dan prosedur pengawasan.
- c. Meningkatnya ketetapan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang ditetapkan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Sinergi Instansi Pemerintah.
- e. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan daerah baik pendapatan maupun belanja mengacu kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah yang sah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kebijakan belanja daerah dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Wujud akuntabilitas pengelolaan belanja SKPD dijabarkan dalam penatausahaan keuangan yang diatur lebih lanjut dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Proses penatausahaan diawali oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, laporan pertanggungjawaban keuangan bendaharawan pengeluaran diverifikasi untuk selanjutnya disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dan direkap oleh bendahara induk kemudian dilaksanakan penyusunan laporan keuangan oleh pembantu PPK bidang akuntansi.

2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja SKPD adalah :

1. Indikator Masukan (*Input*) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (*Impact*) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Indikator masukan berupa ketersediaan dana yang tertuang dalam APBD dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menunjang perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Dana yang ada teralokasi untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

Analisis keuangan SKPD dapat dilihat dari besaran anggaran yang diserap untuk pembangunan. Semakin besar dana yang terserap mengindikasikan kegiatan berjalan secara optimal, namun perlu disadari bahwa indikator keuangan bukanlah satu – satunya alat pengukuran kinerja. Faktor efisiensi dan efektifitas perlu dilihat melalui seberapa besar realisasi fisik yang dicapai dengan dana yang tersedia.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan diukur dari besarnya anggaran yang diserap oleh masing – masing kegiatan, adapun anggaran yang disediakan untuk Dinas Kesehatan setelah dilakukan perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 101.066.396.811,02,- yang terdiri dari Belanja Pegawai (LS) sebesar Rp. 42.758.001.691,02,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 36.724.304.036,00,- serta sisanya Rp. 21.584.091.085,00,- untuk Belanja Modal dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat dari tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
PENDAPATAN	14.084.026.000,00	13.560.722.759,00	96,28
BELANJA-BELANJA	101.066.396.811,02	89.566.868.258.45	88,62
Belanja Pegawai	42.758.001.691,02	40.512.169.191,00	94,75
Belanja Barang dan Jasa	36.724.304.036,00	29.591.937.328,92	80,58
Belanja Modal	21.584.091.085,00	19.462.331.738,53	90,17
SURPLUS/(DEFISIT)	-86.982.370.811,02	-76.006.145.49945	87,38

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITERAPKAN

Penyusunan anggaran belanja dilaksanakan pada awal tahun dan akhir tahun anggaran periode sebelumnya, berbagai dinamika yang terjadi turut mempengaruhi anggaran yang telah disusun. Hal tersebut memaksa dilaksanakannya perubahan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan Pengguna Anggaran / Barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pencatatan terhadap transaksi pendapatan dan belanja dilaksanakan dengan basis kas dimana pengakuan belanja dan pendapatan diakui pada saat kas diterima / dikeluarkan. Pencatatan terhadap asset menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mensyaratkan basis akrual, dimana asset diakui saat asset tersebut diserahkan, namun dalam pelaksanaannya masih memakai basis kas.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran yang dimaksud dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok menggunakan nilai mata uang rupiah. Sejauh ini belum ada terjadi transaksi selain dengan mata uang rupiah, walaupun ada transaksi dengan selain rupiah maka ketentuan yang berlaku mensyaratkan perlu mengkonversi nilai mata uang bersangkutan dengan mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi. Perlakuan untuk asset tetap, nilainya diakui sebesar harga perolehan tersebut

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos – pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan penyusunan Neraca awal Pemerintah Kabupaten Solok, selanjutnya pada Tahun

2015 dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset – aset Pemda Kabupaten Solok untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehannya / pengadaannya, setelah tahun anggaran. Penyajian telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktifa tersebut. Meskipun menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Aktifa tetap, bahwa Asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur / masa manfaat atas aset – aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

B A B V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dan penjelasan masing masing pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1. Pendapatan

- Pendapatan Restribusi Daerah dengan anggaran Rp 2.230.011.500,00,- dengan realisasi Rp.1.626.985.759,00,-.
- Lain-lain Asli Daerah Yang Syah / Kapitasi dengan anggaran sebesar Rp.11.854.014.500,00,- Realisasi Rp 11.933.737.000,00,-

5.1.2. Belanja

- Belanjaoperasi

- Belanja Pegawai Anggaran sebesar Rp. 42.758.001.691,02,- dengan realisasinya sebesar Rp. 40.512.169.191,00,-
- Belanja Barang dan jasa anggaran Rp. 36.724.304.036,00,- dengan realisasi Rp. 29.591.937.328,92,-
- Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 21.584.091.085,00,- dengan realisasi Rp. 19.462.331.738,53,-

5.1.3. Pembiayaan (Khusus untuk SKPKD) -

5.1.4.Aset

- Aset Lancar

Terdapat persediaan asset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. .6.252.604.163,- yang diperoleh dari Kas dan Persediaan.

- Aset tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat umum .

Nilai aset tetap pertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 68.979.259.484,53,- dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Asset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	3.081.648.500	10.619.736.738,53	0	13701385239
2	Peralatan Dan Mesin	26.564.907.898	8.792.802.000,00	0	35357709898
3	Gedung dan Bangunan	37.896.971.223	27.723.000,00	0	37924694223
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	598.091.000	21.070.000,00	0	619161000
5	Asset Tetap Lainnya	37.831.411	0	0	37831411
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Asset Tetap	-18.661.522.286	0	0	-18661522286
Jumlah		49.517.927.746,00	19.461.331.738,53	0,00	68.979.259.484,53

- Asset Tetap Lainnya

- Terdapat Aset Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.133.825.241,00.
- Terdapat Aset Lain-Lainnya Per 31 Desember 2016 sebesar Rp 172.935.992

5.1.5. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 88.985.502.184,53

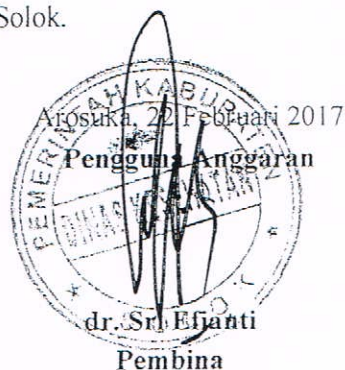
- 5.2. Pengungkapan atas pos pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas ,untuk entitas elaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENUTUP

Penyusunan laporan keuangan DinasDinas Kesehatan Kabupaten Solok merupakan suatu perwujudan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan ini disusun guna memenuhi serangkaian peraturan perundang – undang yang berlaku, dimana sejak dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 disusul Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menuntut pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

Laporan Keuangan DinasKesehatan Tahun 2016 merupakan tahun ke empat sejak penyusunan laporan keuangan di tingkat SKPD diberlakukan. Penyusunan laporan keuangan sebagai bagian yang terintegrasi dalam proses penatausahaan keuangan di Dinas Kesehatan tidak terlepas dari peranan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penatausahaan keuangan tersebut yaitu bendaharawan pengeluaran, petugas verifikasi, pejabat penatausahaan keuangan dan pembantu PPK dibidang akuntansi.

Kita sadari bahwa dalam penyusunan laporan keuangan ini masih terdapat berbagai kelemahan dan keterbatasan. Evaluasi terhadap tahun berjalan perlu kita jadikan pelajaran guna perbaikan dan penyempurnaan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya kita mengharapkan terciptanya sebuah sistem penatausahaan keuangan yang rapi, konsisten dan profesional yang akan berdampak langsung terhadap kualitas penyajian laporan keuangan unit kerja Kabupaten Solok.

Arosuka, 22 Februari 2017
Penguji Anggaran

dr. Sri Efianti
Pembina

NIP : 19690210 200312 2 002